

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Asimetri Informasi

2.1.1.1 Pengertian Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi lebih atas prospek perusahaan dimasa depan dibanding para pemegang saham (pemilik) dan *stakeholder* lainnya (Veno dan Sasongko, 2017). Asimetri informasi dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui informasi perusahaan dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham sehingga memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi dengan berorientasi pada laba (Tarigan, 2011). Semakin besar asimetri informasi yang terjadi maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya manajemen laba (Barus dan Setiawati, 2015).

Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah untuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham. Manajer memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak eksternal. Dhaneswari dan Widuri (2013) mengatakan, manajer hanya dapat memberikan informasi-informasi keuangan dan tidak dapat memberikan informasi-informasi penting yang bersifat rahasia. Di lain sisi, pihak eksternal, terutama investor menginginkan informasi yang transparan untuk pengambilan keputusan. Ketidakselarasan inilah yang menyebabkan munculnya asimetri informasi. Asumsi dalam *Signaling Theory* adalah bahwa manajemen mempunyai informasi

yang akurat tentang nilai-nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar (Spence, 1973). Manajemen secara umum mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan dibanding investor (Yuono dan Widyawati, 2016). Hal ini menyebabkan adanya asimetris informasi antara manajemen dan pemegang saham.

Dalam penelitian Yuono dan Widyawati (2016) dikatakan bahwa teori sinyal menggambarkan bagaimana sinyal-sinyal yang timbul dari informasi yang diperoleh mempengaruhi naik turunnya harga saham dalam lingkup pasar modal. Asumsi dasar dari teori sinyal adalah rasional yang berarti pelaku pasar modal dapat melakukan penyesuaian dalam menanggapi setiap informasi yang diterima agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Teori sinyal juga sangat mengandalkan kepekaan pelaku untuk mengartikan apakah suatu informasi menjadi sebuah peluang atau malah tantangan.

Asimetri informasi timbul karena satu pihak memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak yang lain (Paramita dan Hidayanti, 2013). Sama halnya ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar

perusahaan (Putra, *et. al.*, 2014). Scott (2009) dalam Putra *et. al.* (2014) menyatakan, terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu:

- a. *Advers Selection* yaitu para manajer dan orang-orang dalam lainnya lebih banyak mengetahui tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar. Terdapat fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada *principal*.
- b. *Moral Hazard* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang saham, kreditor) sehingga manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak di luar pengetahuan pemegang saham.

2.1.1.3 Teori *Bid-ask Spread*

Menurut Subali dan Zuhroh (2002) *Bid-ask Spread* adalah selisih antara harga beli tertinggi (*bid*) yang menyebabkan investor bersedia untuk membeli saham tertentu dengan harga jual (*ask*) terendah yang menyebabkan investor bersedia untuk menjual sahamnya. *Bid-ask spread* yang merupakan fungsi dari *transaction cost* mempengaruhi perdagangan dan menyebabkan investor mengharapkan untuk menahan lebih panjang atau pendek asset yang memiliki biaya transaksi yang lebih tinggi atau rendah.

Jika seseorang investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau sekuritas lain dipasar modal, dia biasanya melakukan transaksi melalui broker atau dealer yang memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. Jika investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin menjualnya, maka broker atau dealer yang

akan membeli sekuritas dengan harga *bid*. Perbedaan antara harga *bid* dan harga *ask* ini adalah *spread*.

Jadi *bid-ask spread* merupakan selisih harga beli tertinggi bagi broker atau dealer bersedia untuk menjual saham tersebut. Penggunaan *bid-ask spread* sebagai proksi dari asimetri informasi menurut Komalasari (2001) dikarenakan dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar modal juga menghadapi masalah keagenan. Partisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna mewujudkan tujuannya yaitu membeli atau menjual sekuritasnya, sehingga aktivitas yang mereka lakukan dipengaruhi oleh informasi yang diterima baik secara langsung (laporan publik) maupun tidak langsung (*insider trading*).

Dealers atau market-makers memiliki daya pikir terbatas terhadap persepsi masa depan dan menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan informed traders. Hal inilah yang menimbulkan *adverse selection* yang mendorong dealer untuk menutupi kerugian dari pedagang terinformasi dengan meningkatkan *spread*-nya terhadap pedagang likuid. Jadi dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara *dealer* dan pedagang terinformasi tercermin pada *spread* yang ditentukannya (Komalasari, 2001).

Terdapat tiga komponen kos dalam menetapkan *bid-ask spread* menurut Krinsky dan Lee (1996) dalam Rahmawati, dkk. (2006) menyatakan bahwa:

a. Kos Pemrosesan pesanan (*Order Processing Cost*)

Kos pemrosesan pesanan merupakan kos yang dikeluarkan untuk mengatur transaksi, mencatat serta melakukan pembukuan.

b. Kos Pemilikas Saham (*Inventory Holding Cost*)

Kos pemilikan saham merupakan kos oportunitas dan resiko saham yang berkaitan dengan pemilikan saham.

c. Kos *Adverse Selection*

Kos *adverse selction* terjadi karena informasi terdistribusi secara asimetri diantara partisipan pasar modal, oleh karena itu *broker* atau *dealer* menghadapi masalah adverse selection karena *broker* atau *dealer* melakukan transaksi dengan investor yang memiliki informasi yang superior.

2.1.1.4 Pengukuran Asimetri Informasi

Asimetri Informasi diketahui dengan mengukur *bid-ask spread* suatu perusahaan. Asimetri informasi diproksikan dengan *bid-ask spread*, yang dapat dinyatakan sebagai berikut (Veno dan Sasongko. 2016):

$$SPREAD = \left\{ \frac{(ask_{it} - bid_{it})}{\frac{(ask_{it} + bid_{it})}{2}} \right\} \times 100$$

Keterangan:

SPREAD = *Bid-ask spread* i pada periode t

Ask_{it} = Harga *ask* (tawar) tertinggi saham perusahaan i pada periode t
(31 Desember)

Bid_{it} = Harga *bid* (minta) terendah saham perusahaan i pada periode t
(31 Desember)

2.1.2 *Leverage*

2.1.2.1 Pengertian *Leverage*

Rasio *leverage* ini pada dasarnya menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal atau asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Van Home (2002:357) yang dikutip oleh Hendri Harryo Sandieko (2009) rasio *leverage* adalah Rasio yang menggambarkan tentang proporsi dari jumlah aktiva yang dipinjamkan kepada perusahaan oleh kreditur.

Menurut Husnan Pudjiastuti (2004:70) yang dikutip oleh Hendri Harryo Sandhieko (2009) *leverage* atau rasio hutang adalah Rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang.

Menurut Riyanto (2001:331) *Leverage* adalah Rasio kewajiban terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua total kewajibannya dengan menggunakan modal sendiri. Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio *leverage* adalah rasio yang menggambarkan tentang seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayi oleh hutang.

2.1.2.2 Jenis-Jenis *Leverage*

1. *Operating Leverage*

Operating Leverage merupakan penggunaan *asset* atau operasi perusahaan yang disertai dengan biaya tetap. *Operating leverage* timbul karena adanya

fixed operating cost yang digunakan didalam perusahaan untuk menghasilkan *income*. *Operating leverage* dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan didalam menggunakan *fixed operating cost* untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT). Menurut Primadipta (2012) analisis *operating leverage* membantu pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan sejauh mana peningkatan penjualan berpengaruh terhadap laba operasi perusahaan.

Tingkat *operating leverage* atau biasa dikenal dengan istilah “*degree of operating leverage*” (DOL) dapat diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{DOL} = \frac{\text{Prosentase perubahan EBIT}}{\text{Prosentase perubahan penjualan}}$$

2. *Financial Leverage*

Financial leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap (*fixed financial charges*) yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apa pun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan.

Financial leverage dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa (*earning per share/ eps*). Eps atau pendapatan per lembar saham

biasa ini lebih umum digunakan daripada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa, karena eps ini mengukur tingkat penghasilan/return untuk setiap lembar sahamnya. Pajak, bunga dan dividen semuanya adalah faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya *income* yang tersedia bagi pemegang saham biasa, tetapi pajak bukanlah berubah dengan adanya perubahan EBIT. Oleh karena itu jumlah pembayaran pajak ini tidak mempunyai pengaruh yang langsung terhadap *finansial leverage* perusahaan.

Perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap berarti perusahaan mempunyai *financial leverage*. Penggunaan *financial leverage* agar terjadi perubahan laba per lembar saham (EPS) yang lebih besar dari perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). *Multiplier effect* yang dihasilkan karena penggunaan dana dengan biaya tetap ini disebut dengan *degree of financial leverage* (DFL). Pengukuran tingkat atau *degree of financial leverage* (DFL) dilakukan sebagai berikut:

$$\text{DFL} = \frac{\text{Prosentase perubahan eps}}{\text{Prosentase perubahan EBIT}}$$

3. Total Leverage

Total *leverage* dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap, baik biaya-biaya tetap operasi maupun biaya-biaya tetap *financial* untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap pendapatan per lembar saham biasa. Pengukuran tingkat total *leverage* atau *Degree of Total Leverage* (DTL) dapat dilakukan dengan cara

yang sama seperti pengukuran tingkat *operating* dan *financial* (DOL dan DFL). Formulanya sebagai berikut:

$$DTL = \frac{\text{Prosentase perubahan eps}}{\text{Prosentase perubahan penjualan}}$$

2.1.2.3 Jenis-Jenis Rasio *Leverage*

Leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai *leverage* artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage suatu perusahaan. Menurut Husnan Pudjiastuti (2004:70-71) yang dikutip oleh Hendri Harryo Sendhieko (2009) jenis-jenis rasio *leverage* adalah:

1. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri.

Rumus DER dapat dihitung dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

2. *Times Interest Earned*

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (kadang ditambah juga dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Laba Operasi} + (\text{Penyusutan})}{\text{Bunga}} \times 100\%$$

3. *Debt Service Converage*

Kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan hutang tidak hanya karena membayar bunga dan sewa guna (*leasing*). Ada juga kewajiban dalam bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$DSC = \frac{(Laba\ Operasi + Penyusutan)}{Bunga + Sewa\ Guna + \frac{Angsuran\ Pokok\ Pinjaman}{(1-t)}} 100\%$$

Untuk mengukur sudah baik atau tidaknya *leverage* pada perusahaan, maka harus dibandingkan dengan standar umum rasio solvabilitas yang ada. Dengan merujuk pada Kasmir (2015:164), maka standar industry rasio *leverage* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Standar Rasio Leverage

Jenis Rasio	Standar Rasio
<i>Debt to Assets Ratio</i>	35%
<i>Debt to Equity Ratio</i>	90%
<i>Long Term debt to Equity Ratio</i>	10 Kali

Sumber: Kasmir (2015:164)

2.1.2.3 *Debt to Equity Ratio (DER)*

Menurut Bambang Riyanto (2011:32), *Debt to Equity Ratio* adalah: “Rasio utang dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya (baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.”

Menurut Syamsudin (2009:54), *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah Satu rasio *leverage* yang dapat menunjukkan kemampuan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya.

Menurut Agnes Sawir (2005:121), *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah Rasio yang menggambarkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki.

Menurut Dendawijaya (2009:121), *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik jangka panjang maupun pendek, dengan dana berasal dari modal sendiri.

Menurut Martono dan Harjito (2010:168), *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah Rasio antara total hutang (total debt) dan total asset (total assets) yang dinyatakan dalam persentase.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Jumlah\ Utang}{Total\ Modal\ Sendiri} \times 100\%$$

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *Debt to Equity Ratio (DER)* yaitu rasio yang membandingkan antara total hutang terdapat total shareholder equity yang dimiliki perusahaan. Total hutang disini merupakan total hutang jangka pendek dan total hutang jangka panjang. Sedangkan *shareholder equity* adalah total modal sendiri (total modal saham disetor dan laba ditahan) yang dimiliki oleh perusahaan.

DER dapat digunakan untuk melihat struktur modal suatu perusahaan karena DER yang tinggi menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin tinggi DER

mencerminkan resiko perusahaan relatif tinggi karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga hutang akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki DER yang tinggi. (Robert Ang, 2010:15) yang dikutip (Ratna Cahya Sari, 2014).

Agnes Sawir (2005:13) mengemukakan rasio ini berguna untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai para kreditur. Makin tinggi rasio ini berarti semakin besar dana diambil dari luar. Menurut Dendawijaya (2009:121) kegunaan *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan dana berasal dari modal sendiri.

Menurut Bambang Riyanto (2011:33), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Debt to Equality Ratio (DER)* adalah sebagai berikut :

1. Tingkat hutang
2. Jumlah modal sendiri
3. Ukuran perusahaan
4. Risiko bisnis

2.1.3 Corporate Governance

2.1.3.1 Pengertian Corporate Governance

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*investors* dan *shareholders*) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali dengan

penekanan. Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh suatu komite yang bernama *Cadbury Committee*, Inggris di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report* (dalam Sukrisno Agoes, 2006). Inti dari *corporate governance* adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, yaitu untuk mengatasi masalah yang timbul dari hubungan antara pemilik modal dengan manajer. Permasalahan tersebut adalah keterbatasan pemilik dalam memastikan bahwa modal yang ditanamkannya tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan.

Sekarang ini *corporate governance* menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Definisi *corporate governance* menurut Sutedi (2011:1) menyatakan bahwa *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang saham/Pemilik Modal, Komisaris dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan keberhasilan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Selanjutnya menurut *Cadbury Commite of United Kingdom* menyatakan:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled”.

Dalam kutipan tersebut *Cadbury Commite of United Kingdom* menyatakan bahwa seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan system yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses dan pengendalian usaha untuk menaikan nilai perusahaan sekaligus merupakan sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap para *stakeholders*, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar.

2.1.3.2 Manfaat Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI (2001) mengungkapkan bahwa *corporate governance* memiliki banyak manfaat bagi perusahaan antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

2.1.3.3 Asas *Corporate Governance*

Asas *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing- masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3.4 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki peran penting terhadap penerapan kebijakan perusahaan. Dengan terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan maka kontrol perusahaan ada pada pemilik saham mayoritas dan bisa mempengaruhi kebijakan pemakaian metode akuntansi melalui hak suara pemilik saham mayoritas. Dalam perusahaan dimungkinkan terjadi masalah agensi, dimana terjadi konflik kepentingan antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemilik). Dengan adanya struktur kepemilikan mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan

antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2005). Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5%. Pemegang saham institusional besar diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka panjang. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faisal, 2005).

2.1.3.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusi adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak institusi lain. Institusional dalam hal ini seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Presentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional yang tinggi mampu

meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan semakin kuat.

2.1.3.6 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan investment banking. Kepemilikan institusional diukur melalui proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut (Dwi Sukirni: 2012):

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar akhir tahun}}$$

Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase kepemilikan institusional dengan membandingkan antara jumlah saham kepemilikan institusional dengan jumlah saham yang beredar. Peraturan BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik terkait hak pihak institusional untuk memperoleh saham hingga lebih dari 5% dari saham yang ditawarkan.

Menurut Nabel (2012), kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase. Kepemilikan institusional diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain diluar perusahaan minimal 10% terhadap total saham perusahaan. Serta menurut Ningrum dan Jayanto (2013:432) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional dengan presentase yang besar lebih mampu

untuk memonitor kinerja manajemen Investor Institusional memiliki *power* dan *experience* serta tanggung jawab dalam menerapkan prinsip *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan.

2.1.4 Manajemen Laba

2.1.4.1 Pengertian Manajemen Laba

Pada dasarnya, manajemen laba memiliki beberapa definisi, berikut definisi manajemen laba antara lain:

Menurut Scott (2012:325) manajemen laba (*earnings management*) adalah *Earnings management is the choice by a manager of accounting policies or action affecting earnings, so as to achieve some specific reported earnings objectives.* Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa earnings management adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi atau tindakan yang dapat mempengaruhi laba, yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan dalam pelaporan laba.

Menurut Schipper dalam Usman Sastradipraja (2010:33) manajemen laba (*earnings management*) adalah *earnings management* merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi”

Sedangkan menurut Kieso (2011) manajemen laba (*earnings management*) *is often defined as the planned timing of revenues, expenses, gains, and losses to smooth out bumps in earning.* Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa manajemen

laba sering didefinisikan sebagai perencanaan waktu dalam pengakuan pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian untuk meratakan laba yang berfluktuasi.

Badruzaman (2013) mendefinisikan manajemen laba (*earnings management*) adalah cara yang ditempuh oleh manajemen dalam mengelola perusahaan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan meningkatkan atau menurunkan laba bersih untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan cara memanipulasi laba dalam laporan keuangan dengan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan.

Manajemen laba ini diperbolehkan menurut Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima umum (PABU) tetapi belum diatur dalam PSAK. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan: a) Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait. b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran asset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. c) Persyaratan yang dibuat oleh badan pembuat standart lain dan praktik industry yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b paragraph ini [PSAK No. 1, paragraph 16].

Manajemen laba yang diperbolehkan menurut PABU salah satunya adalah memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Sebagai akibat ketidakpastian aktivitas usaha, banyak unsur laporan keuangan yang tidak dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi. Proses estimasi mempertimbangkan informasi terakhir yang tersedia. Estimasi diperlukan, sebagai contoh untuk penyisihan piutang tak tertagih, keusangan persediaan dan masa manfaat dari asset yang disusutkan. Pengguna estimasi yang wajar adalah bagian yang penting dari penyusutan laporan keuangan dan tidak melemahkan keandalannya [PSAK No.25, paragraph 22].

2.1.4.2 Bentuk Manajemen Laba

Menurut Scott (2003) dalam Sutapa dan Suputra (2016), manajemen laba dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, antara lain:

a. Taking a bath

Taking a bath diterapkan CEO yang baru akan melaporkan kerugian besar di awal laporan dan akan melaporkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan kerugian yang dilaporkan pada laporan awal tersebut. Dengan demikian CEO yang baru akan terlihat kinerjanya bagus.

b. Income Minimizations

Income Minimizations dilakukan untuk menjaga kestabilan laba apabila laba periode berikutnya mengalami penurunan dengan cara mengurangi laba periode sekarang untuk dicadangkan pada periode yang akan mendatang ketika laba menurun.

c. Income Maximizations

Income Maximizations dilakukan untuk meningkatkan laba dengan tujuan meningkatkan bonus.

d. *Income smoothing*

Income smoothing dilakukan menjaga fluktuasi laba dan menjaga kestabilan laba dikarenakan biasanya investor lebih tertarik dengan kestabilan laba.

2.1.4.3 Klasifikasi Manajemen Laba

Klasifikasi manajemen laba (*earnings management*) menurut sastradipraja (2010:33), adalah sebagai berikut:

1. *Cosmetic Earnings Management*

Cosmetic Earnings Management terjadi jika manager memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi *cash flow*. Teknik ini merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi akuntansi akrual yang mungkin terjadi. Standar akuntansi keuangan dan mekanisme pengawasan mengurangi kebebasan ini tetapi tidak mungkin untuk meniadakan pilihan karena kompleksitas dan keragaman aktivitas usaha. Akuntansi akrual yang membutuhkan estimasi dan pertimbangan (*judgements*) menyebabkan kebebasan manager dalam menetapkan angka akuntansi. Meskipun kebebasan ini memberikan kesempatan bagi manager untuk menyajikan gambaran aktivitas usaha perusahaan yang lebih informatif, kebebasan ini juga memungkinkan mereka mempercantik laporan keuangan (*window dress financial statement*) dan mengelola *earnings*.

2. *Real Earnings Management*

Real Earnings Management terjadi jika manajer melakukan aktivitas dengan konsekuensi *cash flow*. Intensif untuk melakukan *earnings management* mempengaruhi keputusan *investing* dan *financial* oleh manajer. *Real earnings management* lebih bermasalah dibandingkan dengan *cosmetic earnings management* karena mencerminkan keputusan usaha yang seringkali mengurangi kekayaan pemegang saham.

2.1.4.4 Motivasi Manajemen Laba

Scott (2012) menjelaskan bahwa motivasi manajer perusahaan dalam melakukan manajemen laba adalah:

1. Perencanaan Bonus (*Bonus Purpose*), hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*) menyatakan bahwa manajer perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan memaksimalkan pendapatan tahun berjalan mereka. Manajer yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang diterimanya.
2. Kontrak Hutang Jangka Panjang (*Debt Covenant*), motivasi *debt covenant* yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang maka manajer cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.
3. Motivasi Politik (*Political Motivation*), perusahaan yang mendapatkan laba besar cenderung menurunkan laba untuk menghindari biaya politik dan

memperoleh kemudahan mendapatkan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.

4. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*), membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan cenderung akan menurunkan laba yang dilaporkan agar dapat meminimalkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.
5. Pergantian CEO, pimpinan atau manajer yang akan habis masa penugasannya atau pension akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian pula dengan pimpinan atau manajer yang pekerjaannya kurang baik, cenderung akan memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.
6. Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offering*), perusahaan *go public* informasi keuangan merupakan sumber informasi yang penting bagi calon investor, maka manajer berusaha untuk menaikkan laba yang dilaporkan.

2.1.4.5 Teknik Manajemen Laba

Tindakan manajemen laba dapat dilakukan dalam beberapa cara memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Badruzaman (2013), beberapa teknik untuk melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut:

- a. *Earnings Management within Boundry of GAAP*
 - 1) Perubahan metode penyusutan
 - 2) Perubahan masa manfaat asset yang akan disusutkan
 - 3) Perubahan estimasi nilai sisa asset yang disusutkan

- 4) Penentuan penyisihan piutang tak tertagih
- 5) Penentuan penyisihan kewajiban garansi
- 6) Penentuan penyisihan untuk *deffered tax asset*
- 7) Penentuan keberadaan *impaired assets*
- 8) Estimasi tahap penyelesaian *long-term contract*
- 9) Estimasi kemungkinan terjadinya klaim atas kontrak
- 10) Estimasi penurunan nilai investasi
- 11) Estimasi jumlah beban akrual atas restrukturisasi
- 12) Menentukan perlunya penurunan nilai persediaan
- 13) Estimasi beban akrual lingkungan
- 14) Membuat asumsi aktuarial untuk *pension plan*
- 15) Menentukan nilai *research and development cost* yang boleh diakui
- 16) Mengubah periode amortisasi *intangible asset*
- 17) Memutuskan kapitalisasi biaya-biaya tertentu
- 18) Menentukan apakah investasi mengakibatkan adanya pengaruh signifikan terhadap *investee*
- 19) Menentukan permanen atau tidaknya suatu penurunan nilai investasi jangka panjang.

b. *Abusive Earnings Management*

- 1) Mempercepat *revenue recognition* yang seharusnya menjadi pendapatan periode berikutnya, atau bahkan mengakui pendapat fiktif
- 2) Mencatat *understated expense*.

2.1.4.6 Pengukuran Manajemen Laba

Penelitian yang berkaitan dengan metode deteksi manajemen laba (*earnings management*) antara lain dilakukan oleh (Dechow et al., 1995:205) yang mengevaluasi berbagai alternatif model untuk mendeteksi manajemen laba berdasarkan accruals. Perbandingan dilakukan terhadap lima model adalah sebagai berikut:

1. Model Healy, pengujian Healy untuk manajemen laba dengan cara membandingkan rata-rata total akrual (dibagi total aktiva periode sebelumnya). Healy (1985) menganggap *non-discretionary accruals* (NDA) tidak dapat diobservasi.
2. Model DeAngelo, model DeAngelo (1985) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan awal dalam total akrual dan dengan asumsi bahwa perbedaan pertama tersebut diharapkan nol, yang berarti tidak ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode terakhir (dibagi total aktiva periode sebelumnya) untuk mengukur *non-discretionary accruals*.
3. Model Jones, Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa *non-discretionary accruals* adalah konstan. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada *non-discretionary accruals*.
4. Model *Modified Jones*, model ini dibuat untuk mengeliminasi tendensi konjungtor yang terdapat dalam *The Jones Model*.
5. Model Industri, *Industri Adjusted Model* (Dechow dan Sloan, 1991) mengasumsi bahwa variasi determinan dari *non-discretionary accruals* adalah sama dalam jenis industri yang sama. Pengujian dilakukan untuk mengetahui

kemampuan model dengan menerapkan pengujian statistik.

2.1.4.7 *Discretionary Accruals*

Jones (1991) mengembangkan model manajemen laba dengan membagi total akrual perusahaan menjadi *non-discretionary accruals* (tingkat akrual yang wajar) dan *discretionary accruals* (tingkat akrual yang abnormal). *Discretionary accruals* yaitu bentuk kebijakan akrual yang bukan karena kebutuhan dari kondisi perusahaan namun dilakukan oleh manajemen untuk menggeser biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode lainnya sehingga tujuan tertentu manajemen dapat terpenuhi.

Discretionary accruals merupakan cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba, dimana cara ini sulit untuk dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan akrual. Akrual diskresioner merupakan akrual yang berasal dari diskresi manajemen. Tingkat akrual yang abnormal (*discretionary accruals*) ini yang menjadi perhitungan bagi para peneliti untuk menentukan apakah perusahaan melakukan praktik manajemen laba atau tidak, sedangkan *non-discretionary accruals* yaitu kebijakan akrual yang disebabkan oleh tuntutan kondisi perusahaan dan terjadi secara alami seiring dengan perubahan dari aktiva perusahaan.

2.1.4.8 *Non-Discretionary Accruals*

Non-discretionary accruals merupakan kebijakan akuntansi yang dipilih perusahaan untuk langsung membebankan (*expense*) atau mengkapitalisasi (*assets*) padahal seharusnya perusahaan belum dapat merealisasikannya, karena *non-discretionary accruals* akhirnya dijadikan ukuran mengetahui besarnya

manajemen laba yang dilakukan manajemen.

Indikasi adanya manajemen laba dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan keuangan diteliti melalui penggunaan akrual. Konsep akrual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. *Discretionary accruals* adalah komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajemen, artinya manajer memberikan intervensinya dalam proses pelaporan keuangan, sedangkan *non-discretionary accruals* adalah komponen akrual yang wajar yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum, oleh karena itu *non-discretionary accruals* merupakan akrual yang wajar dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka *non-discretionary accruals* tidak relevan dalam penelitian ini, oleh karena itu bentuk akrual dalam penelitian adalah bentuk *discretionary accruals* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

Nilai *discretionary accruals (DACC)* untuk mengukur tingkat manajemen laba dihitung dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi (*Modified Jones Mode*) pada (Dechow et al., 1995). Model ini menggunakan total akrual (TACC) yang diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary accruals (DACC)* dan *non-discretionary accruals (NDACC)*. Menurut Rachmawati dkk (2007), *Modified Jones Model* dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya sejalan dengan hasil penelitian (Dechow, et al., 1995).

Menurut Jones (1991) dalam Belkaouli (2007) langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan nilai DACC yang kemudian disebut dengan *Modified Jones Model* adalah sebagai berikut:

Menghitung *Total Accruals (TACC)* untuk periode t dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$TACC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

- TACC_{it} = Total *accruals* perusahaan i pada periode t
- NI_{it} = Laba bersih perusahaan (*Net Income*) perusahaan i pada periode t
- CFO_{it} = Aruh kas operasi *Operating cash flows* perusahaan i pada periode t

Selanjutnya menghitung total *accrual (TACC)* yang diestimasi dengan persamaan *regresi Ordinary Least Square (OLS)*, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{TACC_{it}}{TA_{i,t-1}} = a_1 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + a_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{TA_{i,t-1}} \right) + a_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Keterangan:

- TACC_{it} = Total *accruals* perusahaan i pada periode t
- TA_{i,t-1} = Total assets perusahaan i pada periode t-1

- REV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i antara periode t dan periode t-1
- PPE_{it} = Nilai asset tetap (*Property, plan, dan equipment*) perusahaan i pada periode t

Pada persamaan regresi diatas (a_1, a_2, a_3, a_4), NDACC dapat dihitung dengan memasukkan kembali koefisien-koefisien a.

$$DACC_{it} = \left(\frac{TACC_{it}}{TA_{i,t-1}} \right) - NDACC_{it}$$

Keterangan:

- DACC_{it} = *Discretionary accruals* perusahaan i pada periode t
- TACC_{it} = *Total accruals* perusahaan i pada periode t
- TA_{i,t-1} = *Total assets* perusahaan i pada periode t-1
- NDACC_{it} = *Non-discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

Secara empiris nilai *Discretionary Accruals* dapat bernilai nol, positif, atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*). Sedangkan nilai positif menunjukkan adanya manajemen laba dengan pola peningkatan laba (*income increasing*) dan nilai negatif ini menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola penurunan laba (*income decreasing*). (Sulistyanto, 2014).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan dunia bisnis di masa sekarang ini, laporan keuangan

menjadi media penting dalam pengambilan keputusan bagi setiap perusahaan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar korporasi. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen laba (Rahmawatia, dkk. 2006).

Indikator untuk mengukur manajemen laba yaitu *discretionary accruals* perusahaan, dimana selisih antara TACCit (*Total Accruals* Perusahaan) dengan $Tai.t-1$ (*Total Asset* Perusahaan) dikurangi dengan *Non-discretionary* perusahaan.

Dalam praktik manajemen laba, manajer yang berkewajiban untuk menyampaikan kondisi perusahaan kepada pemegang saham terkadang tidak menyampaikan kondisi informasi sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, kondisi ini disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui informasi perusahaan dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham sehingga memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi dengan berorientasi pada laba (Tarigan, 2011). Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu. Manajer yang cenderung mementingkan kepentingan sendiri (*opportunistic*) dapat memanfaatkan asimetri informasi untuk melakukan manajemen laba. Indikator yang digunakan untuk

mengukur asimetri informasi yaitu *bid-ask spread*, dimana *Bid* (*buying limit order*) *ask* (*selling limit order*) *spread* adalah selisih harga *ask* (tawar) saham tertinggi dengan harga *bid* (minta) terendah saham (Veno dan Sasongko. 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan Dhaneswari dan Widuri (2013) menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi asimetri informasi maka manajemen laba akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra, *et al* (2014), Pramesti Dan Budiasih (2017).

Namun ada pula penelitian yang tidak konsisten dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Rizqi (2012) menemukan bahwa Asimetri informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba disebabkan karena tinggi atau rendahnya tingkat asimetri informasi suatu perusahaan tidak terlalu mempengaruhi praktik manajemen laba itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan karena kemungkinan terjadi kesalahan pada pelaporan keuangan terdahulu yang tidak sesuai dengan kaidah kualitatif (Firdaus, 2013). Sejalan dengan penelitian Rahmando (2016), Yanti Dan Setiawan (2019), dengan hasil penelitian bahwa asimetri informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Selain dari faktor asimetri informasi yang telah dijelaskan, faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba yaitu *leverage*, dimana salah satu alternatif sumber dana perusahaan selain menjual saham di pasar modal adalah melalui sumber dana eksternal berupa hutang. *Leverage* adalah rasio yang

menggambarkan tentang proporsi dari jumlah aktiva yang dipinjamkan kepada perusahaan oleh kreditur (Van Home, 2002:357).

Leverage yang tinggi akan berpengaruh dengan nilai pembiayaan yang juga tinggi dengan maksud untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang, dengan mempertahankan kinerja perusahaan tersebut, diharapkan kreditur juga akan tetap memiliki kepercayaan terhadap manajemen perusahaan (Subhan, 2011). Besarnya tingkat hutang perusahaan (*leverage*) dapat manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen.

Indikator yang digunakan untuk mengukur *Leverage* yaitu dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dimana selisih antara total kewajiban dengan modal sendiri dikali 100, (Husnan Pudjiastuti, 2004:70-71). Jika semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi manajemen laba. Jika perusahaan memiliki utang yang tinggi maka akan menimbulkan biaya yang tinggi. Akibatnya, laba perusahaan menurun sehingga manajemen perusahaan akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba yang semakin besar.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utari dan Sari (2016), Mahawyahrti Dan Budiasih (2016), Pramesti Dan Budiasih (2017), Astuti, et al (2017), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dimana perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akibat besarnya hutang dibandingkan aktiva, diduga melakukan manajemen laba. dengan hasil penelitiannya yaitu *leverage* berpengaruh positif pada manajemen laba.

Namun hal itu tidak sejalan dengan dengan penelitian Rahmando (2016),

Yudiastuti dan Wirasedana (2018), Robert Jao (2010) dengan hasil penelitiannya *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

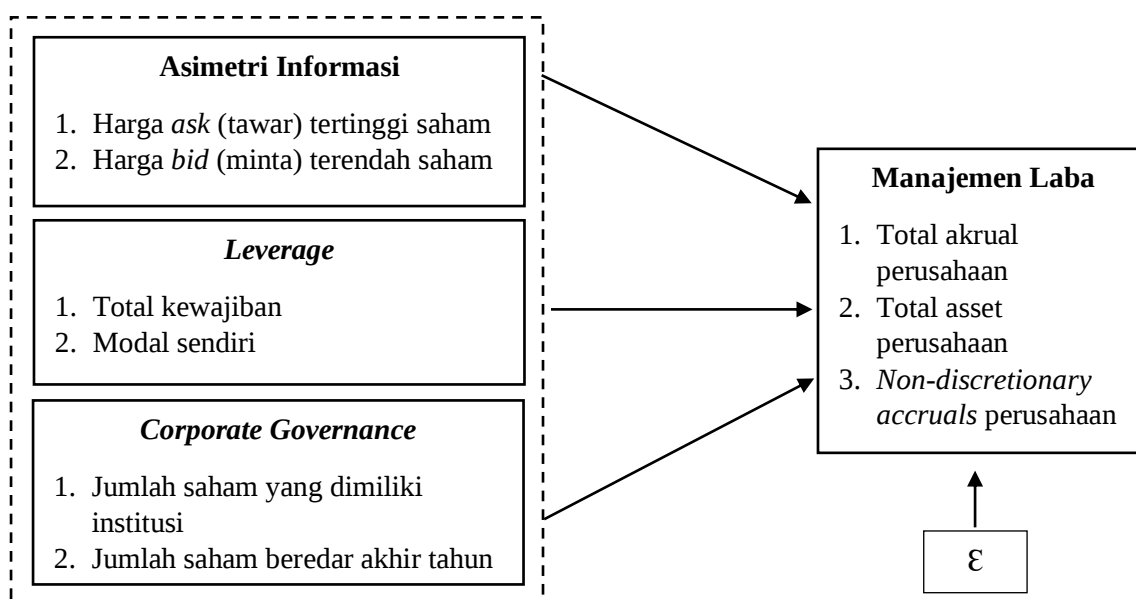
Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan dan agen sebagai pengelola perusahaan menimbulkan masalah keagenan yang dapat memicu terjadinya manajemen laba. Keberadaan investor institusional akan meningkat fungsi monitoring yang lebih baik terhadap tindakan yang dilakukan manajemen (Boediono, 2005). Hal ini dikarenakan investor institusional seperti bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain memiliki tingkat investasi yang besar terhadap perusahaan, sehingga apabila investor institusional merasa tidak puas terhadap kinerja manajer akan modal yang mereka investasikan maka akan menjual sahamnya ke pasar. Hal inilah yang mendasari investor institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih teliti terhadap kinerja manajemen, sehingga mampu mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan. Investor institusional dikatakan sebagai investor yang berpengalaman (*sophisticated*) sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak secara mudah diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer seperti tindakan manajemen laba (Bushee, 1998).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriastuti (2012) menemukan bahwa variabel *corporate governance* dengan indikator kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba didalam perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang besar akan menimbulkan fungsi pengawasan yang lebih ketat, sehingga dapat mencegah

perilaku *opportunistic manager* yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja operasional serta meminimalisir praktik manajemen laba secara efektif. Sejalan dengan penelitian Nazir (2009), Guna dan Herawaty (2010), Rahardi (2013), Dani Rahman Raja (2014), Haryati dan Wahyudi (2017) yang menemukan bahwa *corporate governance* dalam hal ini kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Namun hal itu tidak sejalan dengan hasil penelitian Nazir (2014), Charitou *et. al.* (2007), Mukti (2018), yang menyatakan bahwa *corporate governance* dengan indikator kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Atas dasar pemahaman tersebut maka dibuatlah kerangka pemikiran penelitian yang menganalisis bagaimana hubungan antara asimetri informasi, *leverage* dan *corporate governance* terhadap manajemen laba disajikan dalam gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- = Pengaruh Secara Parsial
 -----→ = Pengaruh Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Asimetri Informasi, *Leverage* dan *Corporate Governance* secara simultan berpengaruh terhadap manajemen Laba
2. Asimetri Informasi berpengaruh positif secara parsial terhadap manajemen laba.
3. *Leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap manajemen laba.
4. *Corporate Governance* berpengaruh negatif secara parsial terhadap manajemen laba.